



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Pendataan Dapodik TA 2024/2025

Nandana A Bhaswara

Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Dapodik merupakan sistem pendataan dan berperan penting dalam menentukan kebijakan pendidikan nasional

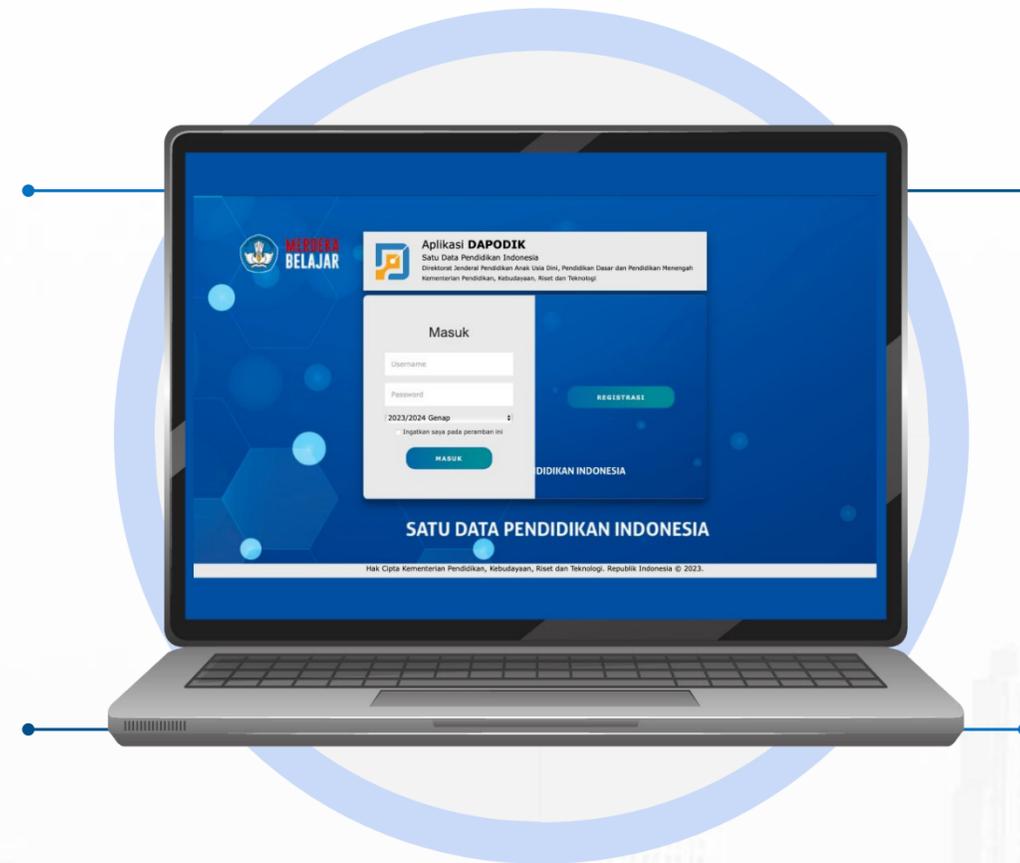
Data yang diinput oleh satuan pendidikan meliputi 4 entitas data yaitu data Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan Substansi Pendidikan.

SATUAN PENDIDIKAN

Identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, alat

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guru, tenaga kependidikan, identitas pribadi, kepegawaian, pendidikan formal



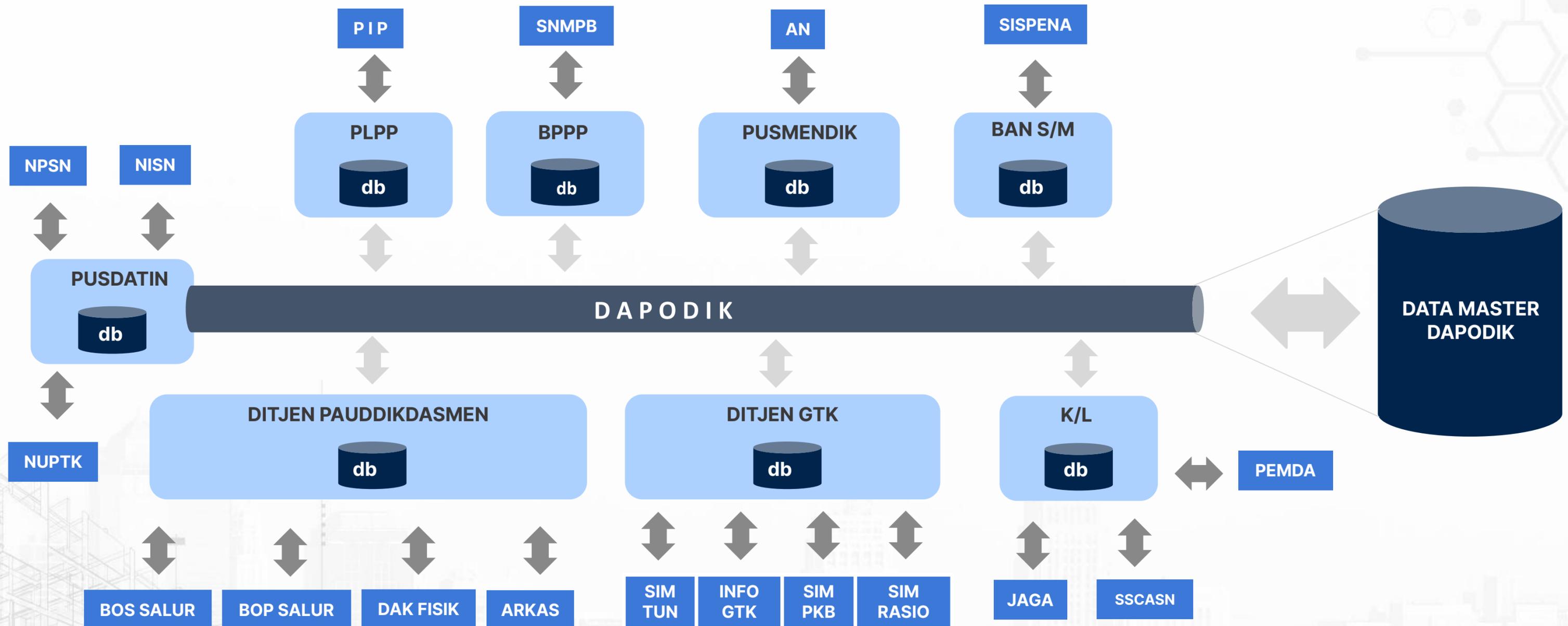
PESERTA DIDIK

Identitas pribadi, tanggal lahir, alamat, orang tua, prestasi

SUBSTANSI PENDIDIKAN

Rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dsb

Dapodik juga sebagai sumber data utama untuk berbagai intervensi kebijakan pendidikan hingga layanan untuk lintas Kementerian/Lembaga



Contoh pemanfaatan Dapodik untuk berbagai intervensi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek

Pelaksanaan Program dan Anggaran 2024



Penerimaan Peserta Didik Baru

Pemberian akses layanan data awal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

Sasaran



23 Provinsi
115 Kabkota



Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru

Pemberian akses layanan data awal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

Sasaran



3,4 Juta Siswa
49 ribu Satpen



58,8 Triliun

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Sasaran



261 ribu Sekolah



55,3 Triliun

Tunjangan Guru

Sasaran



1,6 juta Guru



13,4 Triliun

Program Indonesia Pintar DAK Fisik Pendidikan

Sasaran



18 juta Peserta Didik



14,6 Triliun

Program Indonesia Pintar DAK Fisik Pendidikan

Sasaran



47 ribu Sekolah

Pengelolaan Dapodik diintegrasikan dalam **Satu Data Pendidikan** agar lebih efektif, berkualitas, dan bermanfaat



Sejauh mana pemanfaatan Dapodik untuk satuan pendidikan



DAPODIK

Intervensi anggaran



58,8 Triliun

Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan



55,3 Triliun

Tunjangan Guru



13,4 Triliun

Program Indonesia Pintar
DAK Fisik Pendidikan



14,6 Triliun

Intervensi untuk mendukung proses pembelajaran dan manajemen



**Merdeka
Mengajar**



**Rapor
Pendidikan**



**Akun
belajar.id**

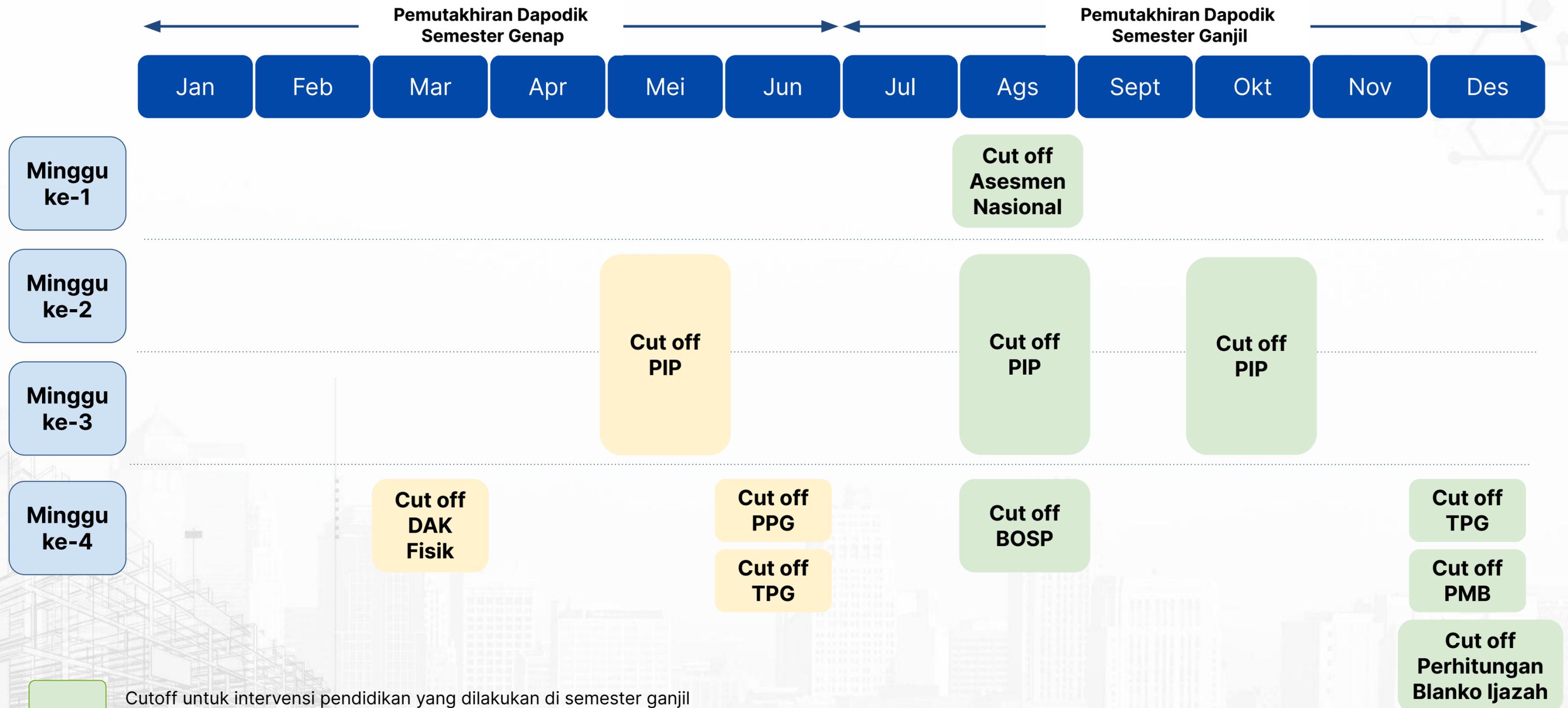


ARKAS



SIPLah

Oleh karenanya, Dapodik perlu melakukan pembaruan untuk mendapatkan data yang akurat dan mutakhir untuk keperluan cut off intervensi pendidikan



Kualitas Data Pokok Pendidikan



Kondisi kuantitas data dapodik per 31 Juni 2024

Rekap Nasional Semester 2023/2024 Genap



± 400rb sekolah



± 50 juta siswa



± 4 juta PTK



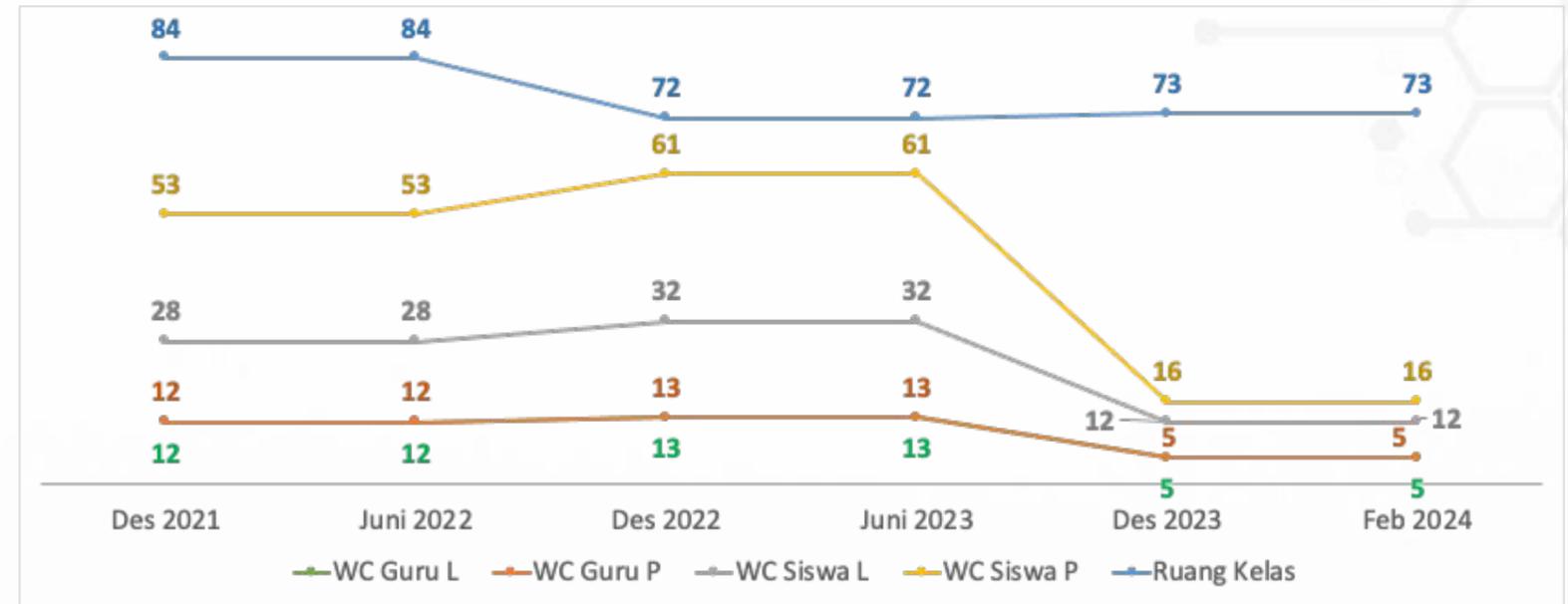
± 2 juta Rombel

#	Sekolah	Peserta Didik	Rombel	Guru	Tendik	Jumlah Kirim	% Kirim
PAUD	204.217	6.661.472	456.380	485.994	227.519	188.274	92%
PKBM & SKB	10.781	1.933.707	92.189	46.986	13.970	9.498	88%
SD	149.422	24.007.422	1.143.949	1.490.798	344.064	148.787	100%
SMP	43.244	9.911.821	350.288	678.090	183.521	42.661	99%
SMA	14.690	5.271.944	171.414	343.698	96.198	14.497	99%
SMK	14.470	4.982.768	186.818	325.489	91.231	14.188	98%
SLB	2.344	158.664	38.646	27.123	8.426	2.323	99%
Total	439.168	52.927.798	2.439.684	3.398.178	964.929	420.228	96%

Kondisi saat ini, masih banyak isu Kualitas Data Dapodik

Salah satunya ditemukan data anomali pada data satuan pendidikan

- 1 Terdeteksi ± 60 ribu ruang (2.8%) mengalami perubahan yang signifikan pada setiap semesternya



44.574

Penerima DAK Fisik Rehabilitasi

4.305

Belum Update Bantuan Rehabilitasi

9,66%

% Belum Update Rehabilitasi

49.159

Penerima DAK Fisik Pembangunan

21.000

Belum Update Bantuan Pembangunan

42,72%

% Belum Update Pembangunan

- 2 Terdapat ± 4 ribu satpen belum update data bantuan rehabilitasi, dan ± 21 ribu satpen belum input bantuan pembangunan ke dalam Dapodik

Selain itu, beberapa masalah ditemukan dalam hal penginputan yang tidak sesuai kondisi lapangan

1 Laporkan Data Siswa Disabilitas, Banyak Sekolah Tak Kooperatif

Fitri Nur Asih Wijayanti - Jumat, 3 November 2023 | 10:35 WIB



Salah Satu Sekolah SMK Swasta Menggelembungkan Jumlah Murid Untuk mendapatkan Anggaran Lebih .

Admin 5 Agustus 2023
Daerah 330 Dilihat



2 Ada Sekolah yang Disebut Manipulasi Data

Luthfi Majid
11 September 2023



Selain itu, beberapa masalah ditemukan dalam hal penginputan yang tidak sesuai kondisi lapangan

3 Pendataan berkebutuhan khusus belum akurat

Terdapat 55 dari 160.205

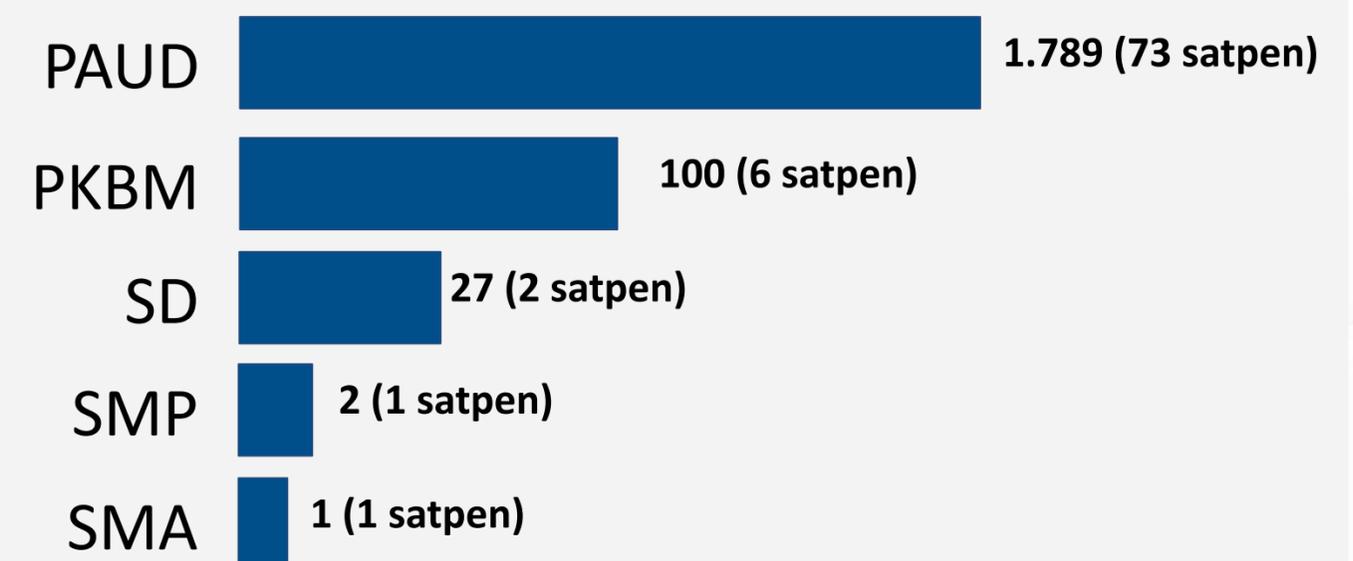
Siswa non disabilitas bersekolah pada Sekolah SLB

Terdapat **83 satpen non SLB** dengan total siswa 1.919 menginputkan **100% siswanya berkebutuhan khusus**

Sebaran Status Siswa Kebutuhan Khusus Jenjang SLB



Sebaran satuan pendidikan non SLB yang memiliki 100% siswa disabilitas



Sehingga diperlukan **kolaborasi** antara pemerintah **pusat dan daerah** dalam mengawal Kualitas Data Dapodik

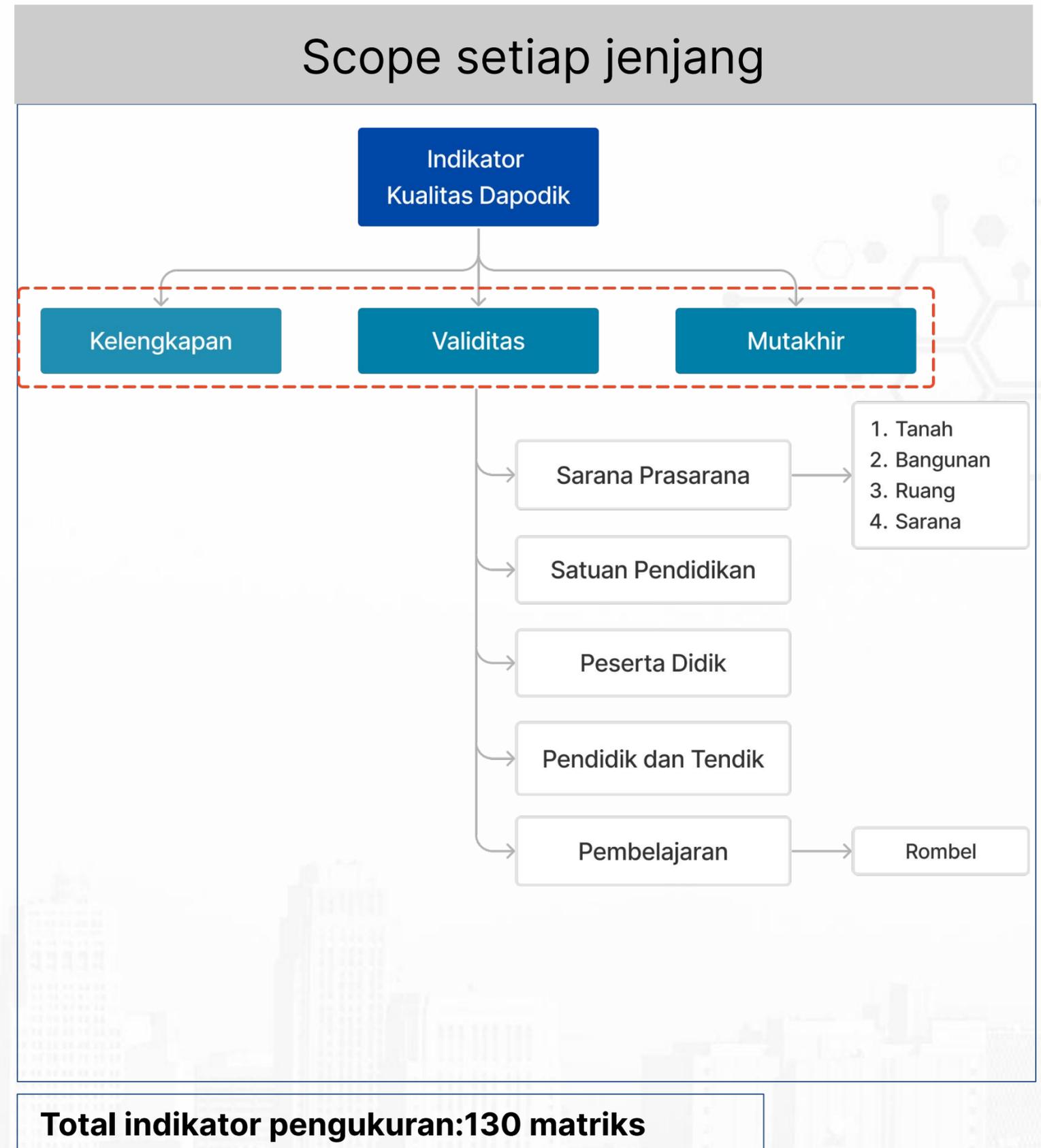
Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT (B2PMP/BPMP)
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik.2. Melakukan pemutakhiran data secara berkala yang dilakukan setiap semester3. Menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi dan validasi Tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk memastikan data pendidikan lengkap, valid dan mutakhir2. Menyediakan pembinaan SDM pendataan melalui pelatihan, koordinasi, pemantauan, dan dukungan pendanaan lainnya3. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan terkait pemutakhiran data Dapodik guna meningkatkan kualitas data	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi dan validasi Tingkat provinsi sesuai wilayah kewenangannya untuk memastikan data pendidikan lengkap, valid dan mutakhir2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pemutakhiran data Dapodik guna meningkatkan kualitas data

Tahun 2024, Kemendikbudristek menginisiasi **Indikator Kualitas Dapodik (IKD)** untuk mengukur capaian kualitas data pada Pemerintah Daerah

- 01 Kelengkapan (*Completeness*)**
 Ukuran tingkat keterisian dan kelengkapan setiap entitas data pokok pendidikan
- 02 Validitas (*Validity*)**
 Ukuran tingkat kesesuaian data dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan.
- 03 Mutakhir (*Up to date*)**
 Ukuran kemutakhiran/kebaruan data pokok pendidikan untuk memastikan data yang dikumpulkan melalui data pokok pendidikan adalah data terkini.

Semester Genap, 31 Juni 2024

Kelengkapan	Validitas	Mutakhir	Total
89,04%	78,09%	84,71%	83,36%



Kemendikbudristek menerbitkan surat edaran untuk mendorong sinergitas Pemda dan Satuan Pendidikan dalam melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan TA 2024/2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610
Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: Manual.1515/C/DS.00.03/2024

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS DATA POKOK PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Kepala BBPMP/BPMP;
4. Kepala TK, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM, di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:

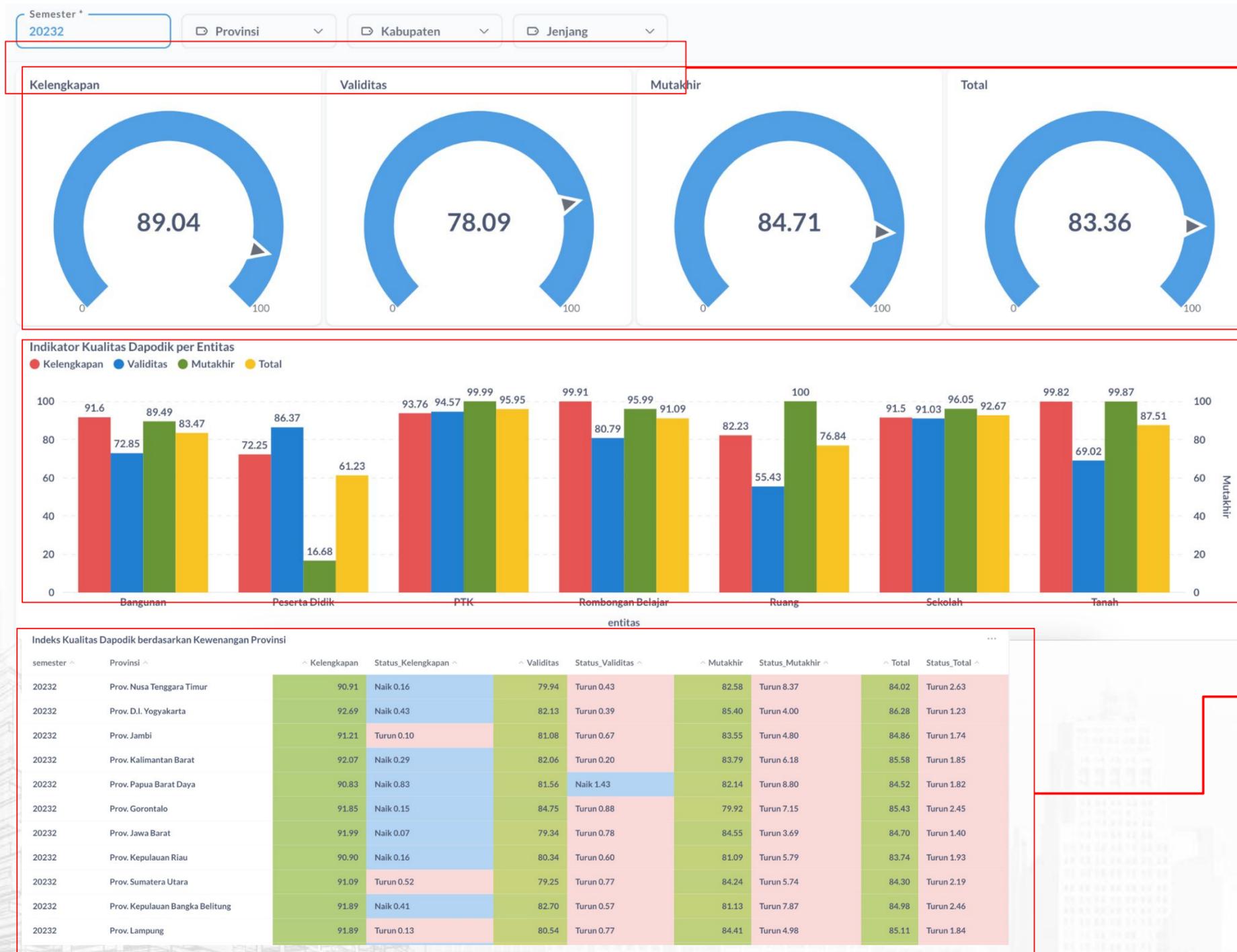
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus dan Pelatihan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah melakukan pembaruan pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) versi 2025 untuk satuan pendidikan yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan terkini.

Dapodik memiliki peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Data yang lengkap, valid, dan mutakhir dapat memudahkan Pemerintah dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan dan

- Rilis Dapodik versi 2025 untuk data pendidikan tahun ajaran 2024/2024
- Menginformasikan cut off BOSP
- Menginformasikan Indeks Kualitas Dapodik untuk Pemerintah Daerah

Kemendikbudristek juga menyediakan Dashboard Indeks Kualitas Dapodik untuk memudahkan Pemda dalam melakukan pemantauan kualitas data



filter semester, wilayah hingga jenjang satuan pendidikan

Capaian nilai Indeks Kualitas Dapodik per Indikator (Kelengkapan, Validitas dan Mutakhir)

Capaian nilai Indeks Kualitas Dapodik per Entitas Data (Tanah, Bangunan, Ruang, Sekolah, Peserta Didik, Rombel dan PTK)

Capaian nilai Indeks Kualitas Dapodik per Wilayah

Tautan Dashboard: <https://s.id/kualitasDapo>

Untuk menghadirkan data yang lengkap, valid dan mutakhir, perlu kolaborasi bersama antara Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan

Mari kita ciptakan data yang berkualitas untuk kebijakan pendidikan yang lebih bermakna



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Indikator Kualitas
Dapodik



Terimakasih



Daftar pembaruan/perbaikan Dapodik versi 2025

Penyesuaian **proses bisnis implementasi kurikulum merdeka** mengacu pada Permendikbudristek 12/2024

1

Penambahan fitur untuk kelengkapan **data ijazah dan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA)**

2

Penambahan **validasi batas usia peserta didik PKBM dan SKB** yang menyesuaikan ketentuan Umur Harapan Hidup (UHH) yang diterbitkan BPS

3

Penyesuaian **validasi jumlah peserta didik per Rombel dan jumlah Rombel paralel** mengacu pada Permendikbudristek 47/2024

4

Penyesuaian **referensi nama Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian** pada SMK berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 244/M/2024

5

Perbaikan profil GTK sebagai dampak pada pembaruan pemetaan jenis dan jabatan GTK

6



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610
Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: Manual.1515/C/DS.00.03/2024

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS DATA POKOK PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Kepala BBPMP/BPMP;
4. Kepala TK, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM, di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus dan Pelatihan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah melakukan pembaruan pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) versi 2025 untuk satuan pendidikan yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan terkini.

Dapodik memiliki peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Data yang lengkap, valid, dan mutakhir dapat memudahkan Pemerintah dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan dan

merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan kualitas Dapodik, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyediakan sistem pendataan pendidikan melalui Dapodik pada laman <https://dapo.kemdikbud.go.id> dengan memberikan pengelolaan manajemen kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui laman <https://datadik.kemdikbud.go.id> dan pengelolaan manajemen kepada satuan pendidikan melalui laman <https://sp.datadik.kemdikbud.go.id>.
2. Sistem Dapodik sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki entitas data yang terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan, meliputi data: identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, alat pembelajaran, dan seterusnya;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi data: guru, tenaga kependidikan, identitas pribadi, kepegawaian, pendidikan formal, dan seterusnya;
 - c. Peserta Didik, meliputi data: identitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi, dan seterusnya; dan
 - d. Substansi Pendidikan, meliputi data: rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombongan belajar, jadwal, dan seterusnya.
3. Aplikasi Dapodik versi 2025, formulir cetak, dan panduan dapat diunduh pada laman <https://dapo.kemdikbud.go.id>.
4. Data Dapodik digunakan sebagai salah satu bahan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Dapodik juga menjadi dasar basis perhitungan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan yang bersumber pada APBN dan APBD.
5. Kondisi saat ini masih terdapat permasalahan dalam kualitas data Dapodik yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal kualitas data Dapodik.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas Dapodik, dapat kami sampaikan informasi Indeks Kualitas Dapodik (IKD) setiap daerah yang dapat diakses oleh Dinas Pendidikan melalui laman: <https://s.id/kualitasDapo>.

Di samping itu, dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan kualitas data Dapodik dimaksud, kami menghimbau:

1. Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
 - a. memastikan data pendidikan lengkap, valid dan mutakhir dengan melakukan verifikasi dan validasi secara berkala;

- b. melakukan bimbingan teknis, pembinaan SDM pendataan, sosialisasi, dan layanan teknis Aplikasi Dapodik versi 2025 kepada seluruh satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik dan memastikan pemahaman yang baik tentang pentingnya pengelolaan data Dapodik yang berkualitas;
 - c. memerintahkan dan memastikan satuan pendidikan untuk melakukan pengisian, pemutakhiran dan pengiriman data Dapodik semester 1 tahun ajaran 2024/2025 dengan menggunakan Aplikasi Dapodik versi 2025;
 - d. memastikan keberadaan satuan pendidikan di wilayahnya dalam keadaan aktif beroperasi;
 - e. melakukan pemutakhiran penugasan Guru, Kepala Sekolah, Plt. Kepala Sekolah melalui laman <https://datadik.kemdikbud.go.id>.
 - f. memastikan satuan pendidikan dalam kewenangannya melakukan pemutakhiran data Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus 2024 guna dijadikan dasar dalam perhitungan alokasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025;
 - g. melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan terkait pemutakhiran data Dapodik guna meningkatkan kualitas data.
2. Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
- a. melakukan pemutakhiran data peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan melalui Aplikasi Dapodik versi 2025;
 - b. melakukan pendataan peserta didik semester 1 tahun ajaran 2024/2025 dengan status naik kelas terlebih dahulu dan selanjutnya peserta didik baru;
 - c. melakukan perbaikan data atribut Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan melalui laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id> dengan memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik sesuai dengan data pada Dukcapil;
 - d. melakukan pemutakhiran status partisipasi BOSP;
 - e. melakukan pemutakhiran data melalui laman <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id> bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginput data izin pendirian dan/atau operasional;
 - f. memastikan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus 2024 guna dijadikan dasar dalam perhitungan alokasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025.

3. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau satuan pendidikan terkait pemutakhiran Dapodik guna meningkatkan kualitas data.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 16 Juli 2024
Direktur Jenderal,

Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D.

Tembusan:

1. Mendikbudristek;
2. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek;
3. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Ditjen PAUD Dasmen.

Kondisi Capaian data Tahun Ajaran 2023/2024

PAUD

91%

SD

100%

SMP

99%

SMA

99%

SMK

98%

SLB

99%

PKBM/SKB

88%

**Rekap Nasional Semester
Genap 2023/2024
1 Juni 2024*

± 400rb sekolah,
± 50 juta data siswa,
± 4 juta PTK,
± 2 juta Rombel



Siklus pemantauan peningkatan Indeks Dapodik

*IKD
Semester
Ganjil*

*Keterangan :
Data cutoff sinkron
semester 1 Thn 2023
(Bln **Desember**)*

*IKD
Semester
Genap*

*Keterangan :
Data cutoff sinkron
semester 2 Thn 2024
(Bln **Juni**)*

*IKD
Semester
Ganjil*

*Keterangan :
Data cutoff sinkron
semester 1 Thn 2024
(Bln **Desember**)*

Perubahan : naik

Daftar **Pembaruan**

- 1 Penambahan proses bisnis dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka
- 2 Penambahan atribut jabatan GTK di Penugasan GTK.
- 3 Penambahan fitur penginputan data ijazah dan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi peserta didik yang telah lulus
- 4 Penambahan Validasi usia peserta didik bagi jenjang PKBM atau SKB
- 5 Perubahan instrumen Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di menu Beranda.

Pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka dapat dilakukan secara bertahap atau serentak [*Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024*]

Jabatan GTK disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh GTK berdasarkan sertifikat pendidik, latar belakang pendidikan (riwayat pendidikan formal), atau bidang keahlian.

Penambahan fitur isian input nomor Ijazah dan Sukma pada Aplikasi Dapodik versi 2025 bagi peserta didik yang sudah lulus atau selesai mengikuti ujian.

Usia disesuaikan dengan umur harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020.

Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jejaring Pendidikan KPK dalam menyelenggarakan monitoring atas implementasi PAK melalui platform Dapodik dalam bentuk instrumen yang perlu diisi oleh satuan pendidikan. [*PKS Nomor 4 Tahun 2022 dan Nomor 03/I/PKS/2022*]

Daftar Perbaikan

- 1 **Validasi jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar paralel.**
- 2 **Penyesuaian referensi mata pelajaran di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.**
- 3 **Penyesuaian referensi nama Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian di jenjang SMK.**
- 4 **Perbaikan penginputan format NIK pada formulir peserta didik dan GTK.**
- 5 **Penonaktifan fitur kenaikan kelas untuk satuan pendidikan pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2024/2025.**
- 6 **Perbaikan profil guru di menu GTK.**
- 7 **Penonaktifan fitur salin penugasan di menu GTK (dilakukan otomatis oleh sistem).**

Penambahan validasi Jumlah Siswa Maksimal per Rombel dan Jumlah Rombel Maksimal sesuai dengan **Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023**.

Penyesuaian referensi mata pelajaran berdasarkan **Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024** tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Penyesuaian referensi nama Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian berdasarkan **Kepmendikbudristek Nomor 244/M/2024** tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pada Kurikulum Merdeka

Validasi penginputan NIK sesuai dengan aturan resmi dikeluarkan pada awal diterapkan e-KTP yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 37**.

Penonaktifan fitur kenaikan kelas hanya diberlakukan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2024/2025(**Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024**)

Penyesuaian sebagai dampak pada pembaruan pemetaan jenis dan jabatan GTK.

Penugasan dilakukan secara otomatis oleh sistem setelah satuan pendidikan melakukan proses registrasi atau sinkronisasi.